



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 97 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 72);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 72) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 97

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 97 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
33. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

## 2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

- 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan.
- 3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula

### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

##### **2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra**

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program**  
**Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut**  
**Tahun 2019-2024 Sampai Triwulan II Tahun 2023**

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
<b>URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN</b>	<b>29.027.926.354</b>	<b>31,62%</b>	<b>9.178.408.567</b>
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.543.980.615	33,41%	6.303.245.745
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.836.227.000	26,77%	2.097.570.925
<b>JUMLAH</b>	<b>29.027.926.354</b>	<b>31,62%</b>	<b>9.178.408.567</b>

*Sumber : Perubahan RENSTRA BAPENDA Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023*

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp29.027.926.354,00, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2023 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp9.178.408.567,00 atau sebesar 31,62%.

**2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA**

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 45,29% untuk target kinerja dan 31,62% untuk target anggaran.

**Tabel 2.2**  
**Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program**  
**RENSTRA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

URUSAN DAN PROGRAM  1	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
	2	3
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN	45,29%	31,62%
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46,50%	33,41%
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	44,07%	26,77%
JUMLAH	45,29%	31,62%

Sumber : PERUBAHAN RENSTRA Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

**2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023**

**2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja**

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran**  
**RENJA BAPENDA Kabupaten Garut Tahun 2023**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN	19.887.455.570,00	46,15%	9.178.408.567,00
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.116.040.520,00	46,84%	7.080.837.642,00
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.771.415.050,00	43,96%	2.097.570.925,00

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
JUMLAH	19.887.455.570,00	46,15%	9.178.408.567,00

Sumber : RENJA Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan Keuangan adalah 46,15%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RENJA dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RENJA, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RENJA.

### 2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 46,15% untuk target kinerja, dan 36,62% untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

**Tabel 2.4**  
**Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Sampai Triwulan II Tahun 2023**

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
	2	3
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN	55,05%	46,15%

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
	2	3
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52,47%	46,84%
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	57,62%	43,96%
Jumlah	55,05%	46,15%

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra SKPD Badan Pendapatan daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut.



**Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Sampai dengan Tahun TW II 2023**

**Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan a/ d tahun 2022	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah a/ d tahun berjalan	
												Realisasi Capaian Program dan Kegiatan a/ d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat peraturan perundang-undangan di Badan Pendapatan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	64,29	100,00
5	2	1	2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	64,29	100,00
5	2	1	2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Ketersediaan Laporan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	40,78	100,00
					Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	86,31	100,00
5	2	1	2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Ketersediaan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	86,31	86,31	100,00
					Persentase Pemenuhan sarana prasarana disiplin ASN dan kesesuaian persentase kearsifan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	62,14	100,00
5	2	1	2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	62,14	100,00
					Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	61,91	100,00
5	2	1	2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	73,81	100,00
5	2	1	2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00

						Tingkat Sarana dan Prasarana aperatur berondisi baik	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	53,34	100,00
5	2	1	2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di Badan Pendapatan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00
5	2	1	2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Badan Pendapatan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	56,67	100,00
5	2	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,81</b>	<b>100,81</b>	<b>100,00</b>	<b>44,07</b>	<b>100,00</b>
						<b>Tingkat pengaduan, saran dan permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>51,07</b>	<b>100,00</b>
5	2	4	2.01.		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerja Sama Pelayanan / Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	73,62	100,00
						Persentase peningkatan pengelolaan sarana administrasi pajak daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	60,00	100,00
						Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasi Sistem pajak	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,40	100,00
						Persentase pengelolaan teknologi informasi pajak daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	30,00	100,00
						Persentase pemenuhan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00
						Persentase tingkat kesadaran, kepatutan dan kepatuhan wajib pajak daerah dan Retribusi Daerah	100,00	100,00	100,00	80,00	80,00	100,00	50,00	100,00

Sumber

Evaluasi

kinerja

dan

Anggaran

Bapenda

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp19.887.455.570,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp9.178.408.567,00 atau mencapai 46,15%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2. 6**  
**Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023**  
**sampai dengan triwulan II**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>19.887.455.570,00</b>	<b>9.178.408.567,00</b>	<b>46,15%</b>
<b>5.02.5.02.02.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.116.040.520,00</b>	<b>7.080.837.642,00</b>	<b>46,84%</b>
5.02.5.02.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.850.000,00	19.479.100,00	50,14%
5.02.5.02.02.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	3.276.700,00	65,53%
5.02.5.02.02.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	1.569.200,00	31,38%
5.02.5.02.02.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000,00	3.276.700,00	65,53%
5.02.5.02.02.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000,00	1.569.200,00	31,38%
5.02.5.02.02.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	2.096.500,00	41,93%
5.02.5.02.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	2.515.800,00	50,32%
5.02.5.02.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.286.745.879,00	4.863.836.517,00	43,09%
5.02.5.02.02.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	28.586.100,00	13.399.200,00	46,87%
5.02.5.02.02.01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	193.091.337,00	99.658.200,00	51,61%
5.02.5.02.02.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	185.302.400,00	181.280.000,00	97,83%
5.02.5.02.02.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43.900.000,00	-	0,00%
5.02.5.02.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.468.800,00	4.747.200,00	45,35%
5.02.5.02.02.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.491.200,00	120.114.040,00	49,95%
5.02.5.02.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak	136.261.900,00	69.022.897,00	50,65%

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	dan Penggandaan			
5.02.5.02.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.896.000,00	4.156.200,00	42,00%
5.02.5.02.02.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.330.000,00	21.572.000,00	49,79%
5.02.5.02.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.658.970,00	54.477.215,00	45,91%
5.02.5.02.02.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000,00	750.100,00	3,00%
5.02.5.02.02.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.183.659.400,00	1.156.904.000,00	97,74%
5.02.5.02.02.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	43.462.000,00	-	0,00%
5.02.5.02.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.403.100,00	-	0,00%
5.02.5.02.02.01.2.07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	197.767.600,00	-	0,00%
5.02.5.02.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	4.163.200,00	41,63%
5.02.5.02.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.143.414,00	48.224.504,00	40,14%
5.02.5.02.02.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.510.000,00	11.085.000,00	18,63%
5.02.5.02.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.552.420,00	70.762.670,00	52,59
5.02.5.02.02.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	464.960.000,00	247.591.999,00	53,25
5.02.5.02.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000,00	36.221.900,00	12,07%
5.02.5.02.02.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	38.754.000,00	77,51
<b>5.02.5.02.02.04.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.771.415.050,00</b>	<b>2.097.570.925,00</b>	<b>43,96%</b>
5.02.5.02.02.04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	88.272.000,00	75.109.800,00	85,09%
5.02.5.02.02.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	77.219.400,00	74.787.600,00	96,85%
5.02.5.02.02.04.2.01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.617.398.400,00	575.916.000,00	35,61%
5.02.5.02.02.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	231.475.200,00	84.950.000,00	36,70%
5.02.5.02.02.04.2.01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	462.383.221,00	76.842.600,00	16,62%
5.02.5.02.02.04.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	239.162.900,00	79.834.500,00	33,38%
5.02.5.02.02.04.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	491.023.057,00	323.092.500,00	65,80%
5.02.5.02.02.04.2.01.09.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	42.474.800,00	20.900.000,00	49,21%

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.02.5.02.02.04.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	154.899.700,00	95.459.400,00	61,63%
5.02.5.02.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	890.012.472,00	477.947.425,00	53,70%
5.02.5.02.02.04.2.01.12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	228.549.800,00	141.782.500,00	62,04%
5.02.5.02.02.04.2.01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	189.257.800,00	40.652.800,00	21,48%
5.02.5.02.02.04.2.01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	59.286.300,00	30.295.800,00	51,10%

Sumber : LRA Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 25 sub kegiatan yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan pekerjaan dilaksanakan pada triwulan III Selain itu, terdapat 24 sub kegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan aktor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Badan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Pada Tahun 2023 (TW II) berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat atau wajib pajak daerah Pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Badan Pendapatan Daerah.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun faktor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :

- 1. Ketepatan penentuan kode rekening belanja sub kegiatan pada tahapan perencanaan dan penganggaran;

- 2. Konsistensi terhadap kode rekening belanja sub kegiatan yang telah dipilih; dan
- 3. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan sesuai rencana anggaran kas atau rencana aksi.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini :

Tabel 2. 7

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) (TW II)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/ Kasi)
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat penghaduan, saran dan permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti	100	457.100	100	236.201	100	271.025	25	117.263	25	24.520					50,00%	141.783	70,00%	377.983	70,00%	83	Bapenda
1		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Penghaduan, keberatan dan konsultasi pajak daerah yang dilayani dan ditindaklanjuti	100	457.100	100	236.201	100	271.025	25	117.263	25	24.520					50,00%	141.783	70,00%	377.983	70,00%	83	Bidang Pendataan
		Pelayanan dan Konsultasi Wajib pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	4	84.980			2	42.475	1	13.335	1	7.565					2	20.900	2	20.900	50	24,6	Subbid Penetapan Pajak Daerah
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	56.000	457.100	28.000	236.201	28.000	228.550	7.000	117.263	7.300	24.520					14.300	141.783	42.300	377.983	75,54	82,69	Subbid Penetapan Pajak Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%)																		51,07	62,04					
Predikat kinerja																		R	R					
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100	30.444.283	100		100	15.116.041	23,61	1.693.414	17,5												Bapenda
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat peraturan perundang-undangan di Badan Pendapatan Daerah	100		100		100		25		25												Bapenda
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	349.902	100	51.044	100	68.850	25	18.746	25	11.395					1,71	4.305,82	#####	82,14	38,65		Sekretariat
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	77.700	6	45.857	6	38.850	1	9.739	2	6.530					3	16.269	9	62.127	75	79,96	Subkoor Renevlap
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	10.000	1		1	5.000	-	2.422	1	855					1	3.277	2	3.277	100	32,77	Subkoor Renevlap
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	10.000	1		1	5.000	-	785	-	785					-	1.569	1	1.569	50	15,69	Subkoor Renevlap
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	10.000	1		1	5.000	-	2.492	1	785					1	3.277	2	3.277	100	32,77	Subkoor Renevlap
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	10.000	1		1	5.000	-	785	-	785					-	1.569	1	1.569	50	15,69	Subkoor Renevlap
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	12	10.000	6	5.187	6	5.000	3	1.258	3	839					6	2.097	12	7.283	100	72,83	Subkoor Renevlap
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	10.000	1		1	5.000	-	1.266	1	818					1	2.083	2	2.083	100	20,83	Subkoor Renevlap
Rata-rata capaian kinerja (%)																		64,29	45,62					
Predikat kinerja																		R	SR					



Rata-rata capaian kinerja (%)																		73,81	33,17								
Predikat kinerja																		B	BR								
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	642.412	100	180.000	100	324.200	25	62.646	50	42.040														Sekretariat
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	20.000	12	10.000	12	10.000	?	1.667	?	1.667					6	3.330	18	13.330	75	66.65			Subkoor Renewlap	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	240.287	12	85.585	12	120.148	?	24.170	?	15.877					6	40.047	18	125.692	75	52.28			Subkoor Renewlap	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	119.020	4	59.347	4	59.510	1	5.548	1	3.733					2	9.205	6	68.012	75	57.05			Subkoor Renewlap	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	269.105	12	25.729	12	134.552	?	31.267	?	20.777					6	52.044	18	77.772	75	28.9			Subkoor Renewlap	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		50	30,22								
Predikat kinerja																		BR	BR								
			Tingkat Sarana dan Prasarana aparaturnya ber kondisi baik	90	4.202.504	90	1.682.747	90	2.401.252																	Bapenda	
7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di Badan Pendapatan Daerah	100	3.172.384	100	968.311	100	1.326.292	20	1.156.904		-						1.156.904							Sekretariat	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	46	2.347.319	23	834.920	23	1.183.659	23	1.156.904		-					23	1.156.904	46	1.391.824	100	84.14			Subkoor Renewlap	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	86.924	1		1	43.462	-		-	-					-	-	1	-	50	0			Subkoor Renewlap	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	322.806	2	66.015	2	161.483				-					-	-	2	66.015	50	20.45			Subkoor Renewlap	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	395.595	2	67.376	2	197.768				-					-	-	2	67.376	50	17.03			Subkoor Renewlap	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		31	144								
Predikat kinerja																		BR	BR								
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Badan Pendapatan Daerah	100	1.629.920	100	714.435	100	814.960		138.503		88.296						247.399							Sekretariat	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	166	929.920	83	473.370	83	464.960	83	109.507	83	70.916					166	180.423	249	653.693	150	70.3			Subkoor Renewlap	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	10	600.000	5	194.748	5	300.000	-	10.342	2	17.920					2	28.222	7	222.970	70	37.16			Subkoor Renewlap	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	10	100.000	5	46.418	5	50.000	?	38.754		-					?	38.754	8	85.172	80	25.17			Subkoor Renewlap	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		16,6	4,6								
Predikat kinerja																		B	BR								

1	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Meningkatkan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100	9.000.781	103,44	7.054.637	100	4.500.390	25,29	1.433.201	50,58	414.332							1.847.532		82,08	128,64	Bapenda
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerja Sama Pelayanan / Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	100	176.544	100	175.930	100	88.272	0	14.932	3	58.689					6	73.621	12	174.142	100	98,64	Bidang TI
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah	-	-		75.410						-											
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12	176.544	6	100.520	6	88.272	3	14.932	3	58.689					6	73.621	12	174.142	100	98,64	Subbid Pengembangan dan Regulasi
			Persentase peningkatan pengelolaan sarana administrasi pajak daerah	100	3.234.797	100	682.708	100	1.617.398	3	540.916	3	35.000					6	575.916	16	1.258.624	80	39	Bidang Pendataan
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20	3.234.797	10	682.708	10	1.617.398	3	540.916	3	35.000					6	575.916	16	1.258.624	80	38,91	Subbid Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah
			Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Eksistensi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasi Sistem pajak	100	1.923.322	100	385.959	100	961.661	44	337.765	252	91.763					504	429.527	1.512	1.562.483	75	246	Bidang Pendataan
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8	462.950	4	385.959	4	231.475	1	54.940	1	30.610					2	85.550	6	471.509	75	101,85	Subbid Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2.000	478.326	1000	225.233	1000	239.163	250	55.492	250	24.343					500	79.835	1.500	305.067	75	63,78	Subbid Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	8	982.046	4	521.764	4	491.023	1	227.333	1	36.810					2	264.143	6	785.907	75	80,03	Subbid Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
			Persentase pengelolaan teknologi informasi pajak daerah	100	924.766	100	872.920	100	462.383	30	46.918	1	22.975					2	69.893	6	942.812	75	102	Bidang TI
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	8	924.766	4	872.920	4	462.383	1	46.918	1	22.975					2	69.893	6	942.812	75	101,95	Subbid Pengelolaan TI
			Persentase pemenuhan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	100	309.799	100	350.801	100	154.900	30	71.993	4	22.398					8	94.391	24	445.192	75	144	Bidang Penghasilan
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	32	309.799	16	350.801	16	154.900	4	71.993	4	22.398					8	94.391	24	445.192	75	143,7	Subbid Pencatatan dan Pelaporan Pajak Daerah

			Persentase tingkat kesadaran, kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak daerah dan Retribusi Daerah	100	2.431.552	100	4.536.319	100	1.215.776		420.677	6	183.507					12	604.184	32	5.190.503	83	143	Bidang Penagihan
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	154.439	2	283.431	2	77.219	1	30.882	1	43.906					2	74.788	4	358.218	100	231,95	Subbid Penagihan Pajak Daerah
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	24	1.780.025	12	4.105.320	12	890.012	3	347.319	3	122.590					6	469.909	18	4.575.230	75	257,03	Subbid Penagihan Pajak Daerah
			Persentase Pencantuman Dokumen/ Laporan Pelaksanaan Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					100	243.544	2	42.475	2	17.011											Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4	378.516	2	197.568	2	189.258	1	25.174	1	8.430					2	33.605	4	231.173	100	61,07	Subbid Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	8	118.573	4		4	59.286	1	17.301	1	8.581					2	25.882	6	25.882	75	21,83	Subbid Pengawasan dan Pemeriksaan Retribusi Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%)																		64,17	43,96					
Predikat kinerja																		R	R					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DANANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																		55,05	46,15					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																		R	SR					

Sumber : Lap. Evaluasi renja, 2023

**Tabel 2.8**  
**Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Sampai dengan**  
**Triwulan II Tahun 2023**

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pajak Hotel	12.500.000.000,00	5.088.806.245,00	40,71
2.	Pajak Restoran	22.130.000.000,00	11.339.538.052,00	51,24
3.	Pajak Hiburan	7.700.000.000,00	3.010.930.629,00	39,10
4.	Pajak Reklame	7.000.000.000,00	2.055.216.513,00	29,36
5.	Pajak Penerangan Jalan	34.000.000.000,00	18.981.538.954,00	55,83
6.	Pajak Mineral Bukan Logam	2.100.000.000,00	667.447.117,00	31,78
7.	Pajak Parkir	966.800.000,00	329.560.794,00	34,09
8.	Pajak Air Tanah	860.000.000,00	199.990.326,00	23,25
9.	Pajak Sarang Burung Walet	15.200.000,00	11.900.000,00	78,29
10.	BPHTB	36.500.000.000,00	20.914.873.868,00	57,30
11.	Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB)	48.200.000.000,00	13.148.245.440,00	27,28
<b>Jumlah</b>		<b>171.972.000.000,00</b>	<b>75.784.794.283,00</b>	<b>44,07</b>

Berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah triwulan II Tahun 2023 secara keseluruhan pada periode bulan yang sama mengalami peningkatan sebesar Rp10.621.158.855,00 atau sebesar 16,30% yang mana realisasi pajak daerah sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar Rp75.784.794.283,00 dari target sebesar Rp171.972.000.000,00 atau terealisasi sebesar 44,07%, sedangkan realisasi pajak daerah triwulan II tahun 2022 terealisasi sebesar Rp65.163.635.428,00. Adapun rincian per kode rekening adalah sebagai berikut :

- 1) **Pajak Hotel**, Penerimaan dari Pajak Hotel Tahun 2023 sebesar Rp5.088.806.245,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp12.500.000.000,00 atau sebesar 40,71%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, per Juni tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 4.349.518.965,00 dengan realisasi 35,65%, atau meningkat sebesar 17,00% pada periode bulan yang sama.
- 2) **Pajak Restoran**, penerimaan pajak dari Restoran dan rumah makan dari target sebesar Rp 22.130.000.000,00 dapat terealisasi sampai dengan Bulan Juni Tahun 2023 sebesar Rp 11.339.538.052,00 atau sebesar 51,24 %. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, per Juni tahun 2022 terealisasi sebesar Rp9.741.546.603,00,00 dengan

realisasi 52,94%, atau meningkat sebesar 16,40% pada periode bulan yang sama.

- 3) **Pajak Hiburan**, penerimaan pajak dari taman air dan hiburan dari target sebesar Rp 7.700.000.000,00, dapat terealisasi sampai dengan Bulan Juni Tahun 2023 sebesar Rp3.010.930.629,00, atau sebesar 39,10%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, per Juni tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 2.411.723.117,00 dengan realisasi 34,95%. atau meningkat sebesar 24,85% pada periode bulan yang sama.
- 4) **Pajak Reklame**, penerimaan pajak dari Reklame dari target sebesar Rp 7.000.000.000,00 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2023 dapat terealisasi sebesar Rp2.055.216.513,00 atau sebesar 29,36%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, per Juni tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 2.252.329.435,00 dengan realisasi 38,40%, atau menurun sebesar 8,75% pada periode bulan yang sama.
- 5) **Pajak Penerangan Jalan**, penerimaan pajak dari penerangan jalan dari target sebesar Rp 34.000.000.000,00 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2023 dapat terealisasi sebesar Rp 18.981.538.954,00 atau sebesar 55,83%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, per Juni tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 17.450.058.580,00 dengan realisasi 52,88%, atau meningkat sebesar 8,78% pada periode bulan yang sama.
- 6) **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**, penerimaan pajak dari mineral bukan logam dan batuan dari target sebesar Rp 2.100.000.000,00 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2023 dapat terealisasi sebesar Rp667.447.117,00 atau sebesar 31,78%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, per Juni tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 589.969.628,00 dengan realisasi 31,67%, atau meningkat sebesar 13,13% pada periode bulan yang sama.
- 7) **Pajak Parkir**, penerimaan pajak dari parkir, dari target sebesar Rp 966.800.000,00 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2023 dapat terealisasi sebesar Rp 329.560.794 atau sebesar 34,09%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, per Juni tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 293.894.881,00 dengan realisasi 36,51%, atau meningkat sebesar 12,14% pada periode bulan yang sama.

- 8) **Pajak Air Tanah**, penerimaan pajak dari Air Tanah dari target sebesar Rp 860.000.000,00, sampai dengan Bulan Juni Tahun 2023 dapat terealisasi sebesar Rp199.990.326,00 atau sebesar 23,25%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, per Juni tahun 2022 terealisasi sebesar Rp281.543.658,00 dengan realisasi 42,21%. atau menurun sebesar 28,97% pada periode bulan yang sama.
- 9) **Pajak Sarang Burung Walet**, penerimaan pajak dari Sarang burung walet dari target sebesar Rp15.200.000,00, sampai dengan Bulan Juni Tahun 2023 dapat terealisasi sebesar Rp11.900.000,00 atau sebesar 78,29%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, per Juni tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.900.000,00 dengan realisasi 42,61%, atau meningkat sebesar 142,86% pada periode bulan yang sama.
- 10) **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**, penerimaan pajak dari target BPHTB sebesar Rp36.500.000.000,00 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2023 dapat terealisasi sebesar Rp20.914.873.868,00 atau sebesar 57,30%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, per Juni tahun 2022 terealisasi sebesar Rp14.202.790.635,00 dengan realisasi 52,33%, atau meningkat sebesar 47,26% pada periode bulan yang sama.
- 11) **Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan**, penerimaan pajak dari PBB dari target sebesar Rp48.200.000.000,00 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2023 dapat terealisasi sebesar Rp13.148.245.440,00 atau sebesar 27,28%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, per Juni tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 13.585.359.926,00 dengan realisasi 29,56%, atau menurun sebesar 3,22% pada periode bulan yang sama.

Upaya yang telah dilaksanakan dalam mendorong capaian realisasi pajak antaran lain :

1. Pelaksanaan verifikasi objek pajak dan subjek pajak PBB yang bertujuan untuk memberikan pelayanan perbaikan data SPPT untuk disesuaikan dengan data terkini;
2. Peningkatan kesejahteraan pegawai PNS dan non PNS yang memiliki fungsi sebagai pendata dan penagihan pajak daerah;

3. Peningkatan sarana operasional penagihan berupa 1 unit roda empat (avanza) dan 15 unit roda dua.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada wajib pajak, tidak hanya dalam hari kerja, tetapi juga pada waktu libur dan hari besar lainnya;
5. Melaksanakan upaya intensifikasi dan verifikasi secara menyeluruh ke semua wajib pajak;
6. Koordinasi, komunikasi, dan pengawasan kepada semua wajib pajak dari semua jenis Pajak Daerah.

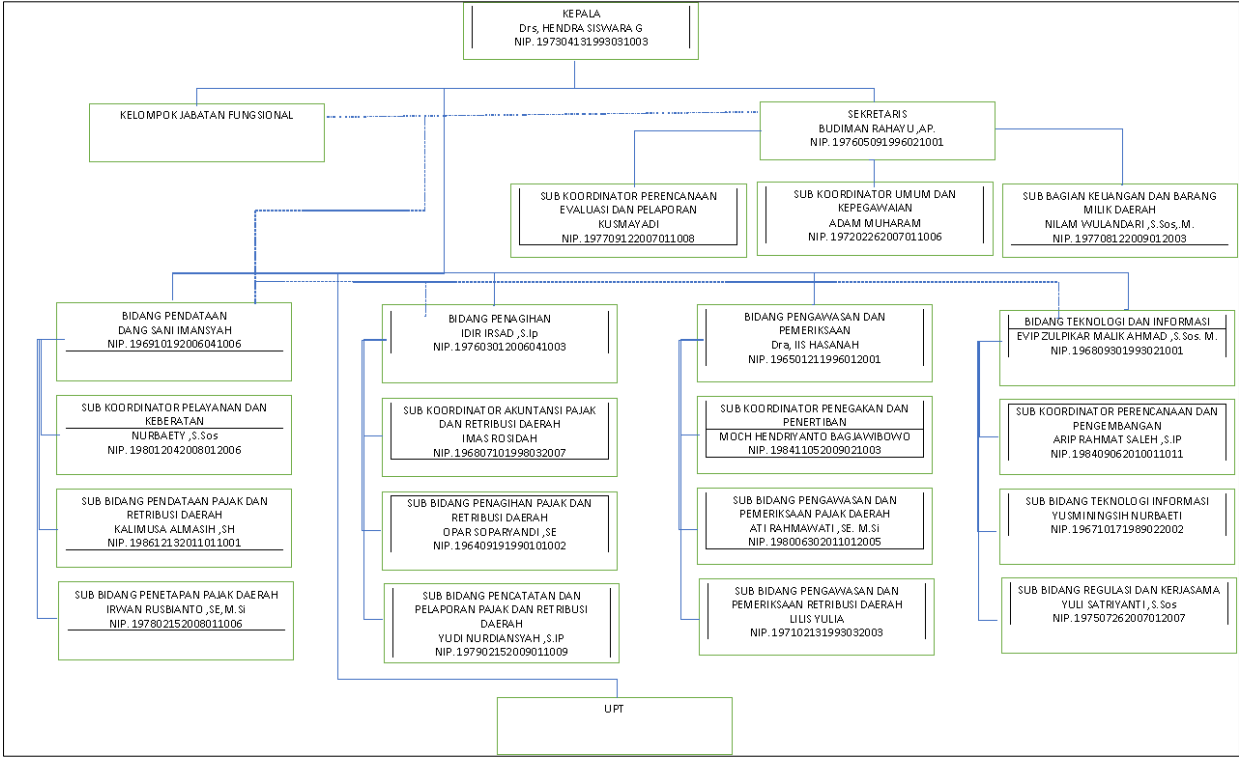
### **2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi. Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan/SKPD berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur

kinerja dan indikator pelayanan masing - masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Bagan 2.1**  
**Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut**



Sumber Peraturan Bupati Garut Nomor 272 Tahun 2021

Dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 272 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tugas, fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

**Tugas dan Fungsi Kepala Badan:**

- 1. Tugas  
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengelolaan urusan pendapatan daerah, pendataan dan penetapan, penagihan, akuntansi dan pelaporan serta pengembangan dan kerjasama.
- 2. Fungsi

- a. perumusan kebijakan urusan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pendapatan daerah; c.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Tugas dan Fungsi Sekretaris:**

#### **1. Tugas**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi Badan meliputi umum, kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

#### **2. Fungsi**

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah dan perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan Badan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan;
- d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendataan:**

#### **1. Tugas**

Bidang Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan Pendataan berdasarkan Rencana Strategis Badan.

#### **2. Fungsi**

- a. perencanaan pengelolaan urusan Bidang Pendataan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang Pendataan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Pendataan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Tugas dan Fungsi Bidang Penagihan:**

#### **1. Tugas**

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penagihan berdasarkan Rencana Strategis Badan.

#### **2. Fungsi**

- a. perencanaan pengelolaan urusan Bidang Penagihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang Penagihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Penagihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Tugas dan Fungsi Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan:**

#### **1. Tugas**

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan Rencana Strategis Badan.

#### **2. Fungsi**

- a. perencanaan pengelolaan urusan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Tugas dan Fungsi Bidang Teknologi dan Informasi:**

#### **1. Tugas**

Bidang Teknologi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan teknologi dan informasi berdasarkan Rencana Strategis Badan.

#### **2. Fungsi**

- a. perencanaan pengelolaan urusan Bidang Teknologi dan Informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang Teknologi dan Informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Teknologi dan Informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja

Untuk lebih jelasnya pencapaian kinerja dapat disajikan tabel 2.9 sebagai berikut:

**Tabel 2.9**  
**Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai IKM			80,50	80,75	81,00	81,25	81,34	81,35	82,11	81,36	81,40	
2	Nilai SAKIP Bapenda			70,00	71,00	71,50	72,00	77,61	80,66	84,61	84,61	84,61	
3	Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah			17,50	5,00	5,50	6,00	-20,6	18,11	13,81	14,5	15,2	

*Sumber : LKIP Bapenda Kabupaten Garut Tahun 2023*

Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dinilai berdasarkan kuesioner menggunakan 9 unsur penilaian dengan jumlah responden 150 orang berbagai latar belakang masyarakat pengguna layanan yaitu wajib pajak. Nilai IKM tahun 2022 mencapai 82,11% melampaui target 81% meningkat 0,76% dari capaian tahun 2021 sebesar 80,75%. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian diantaranya:

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah yang representatif di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
- b. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pelayanan di kantor.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu proses runtut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diukur menggunakan indikator yang jelas, terukur, disepakati dalam perjanjian kinerja berjenjang, dan dievaluasi secara periodik menggunakan standar yang telah ditentukan sebagai media pertanggung jawaban dan bahan perbaikan kinerja berkesinambungan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Capaian hasil evaluasi SAKIP Badan Pendapatan Daerah tahun 2022 memiliki predikat A yang artinya SAKIP di Bapenda Garut telah berjalan dengan sangat baik, masing-masing tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja telah memiliki keterkaitan yang konsisten baik antar dokumen di Bapenda maupun dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Garut, indikator kinerja dapat diukur dengan akurat didukung dengan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan sangat baiknya capaian SAKIP tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Bapenda telah memiliki sistem yang mendukung:

- a. Umpan balik pengambilan keputusan stakeholder.
- b. Perbaikan manajemen pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah.
- c. Pertanggung jawaban penggunaan anggaran kepada pemangku kepentingan juga kepada masyarakat.

Kabupaten Garut mengelola pajak daerah sebanyak 11 jenis terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir,

Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan, PBB P2, BPHTB, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan. Disamping itu, Bapenda Garut juga sebagai koordinator pendapatan daerah mencatat realisasi retribusi daerah dari 3 jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang dipungut oleh 10 SKPD. Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2022 sebesar 158.338.966.605 dari target 156.3611.500.000 atau mencapai 101,30%. Capaian Realisasi Pajak Daerah sebesar 100,81% atau sebesar Rp. 157.571.287.834. Capaian Retribusi daerah belum memadai berhubungan besarnya realisasi retribusi sangat dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat akan retribusi di masing-masing SKPD. Capaian Pajak Daerah tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan sekalipun Kabupaten Garut masih terdampak Pandemi Corona, hal ini disebabkan. Pada tahun 2021 sebesar 141.848.874.230 dari target 139.941.136.763 atau mencapai 101,36%. Capaian Realisasi Pajak Daerah sebesar 103,44% atau sebesar Rp. 126.588.915.160 dan Capaian Retribusi Daerah mencapai 86,91% atau sebesar Rp. 15.259.959.070. Capaian Pajak Daerah tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan :

- a. Pelaksanaan monitoring dan verifikasi pembayaran pajak daerah.
- b. Pembinaan dan Pemeriksaan Penerimaan Realisasi PBB P2 di wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan yang belum mencapai target ideal pada bulan/tahunan masa pajak.
- c. Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah.

## **2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, isu-isu penting yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut :

1. Adanya perubahan peraturan perundangan pajak dan retribusi daerah yaitu ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

2. Hambatan teknis terkait pengadaan barang dan jasa masih dalam proses pengadaan.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1. Segera melakukan persiapan penyusunan dan penetapan peraturan daerah terkait pajak dan retribusi daerah;
2. Percepatan pengadaan barang dan jasa;
3. Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan.

## **2.5 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Bdan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan Program prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran belanja perubahan tahun 2023 yang diusulkan Badan Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan sebesar

Rp22.447.455.570 meningkat Rp.2.560.000.000 dari anggaran sebelum perubahan dan Belanja sebesar Rp. 19.887.455.570.

2. Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Bapenda Kabupaten Garut diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.
  - a. Perbandingan rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Bapenda Kab. Garut untuk anggaran belanja mengusulkan 2 (dua) Program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan.
  - b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan/SKPD mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.10  
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023  
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

No.						Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2					KEUANGAN				22,447,455,570	KEUANGAN				22,447,455,570	
5	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	17,676,040,520	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	17,676,040,520	
5	2	1	2,01			Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	100 %	68.850.000	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	100 %	68.850.000	
5	2	1	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	38.850.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	38.850.000	
5	2	1	2,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
5	2	1	2,01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
5	2	1	2,01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	

No.					Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2	1	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	5.000.000	
5	2	1	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	
5	2	1	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.000.000	
5	2	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Laporan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	100 %	13.875.331.979	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Laporan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	100 %	13.875.331.979	
5	2	1	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang/bulan	13.846.745.879	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang/bulan	13.846.745.879	
5	2	1	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	28.586.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	28.586.100	
5	2	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tersedia	100 %	193.091.337	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tersedia	100 %	193.091.337	
5	2	1	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	193.091.337	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	193.091.337	

No.						Rancangan Perubahan RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2	1	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	100 %	229.202.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	100 %	229.202.400	
5	2	1	2,05	01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	0	
5	2	1	2,05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	185.302.400	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	185.302.400	
5	2	1	2,05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0	
5	2	1	2,05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	43.900.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	43.900.000	
5	2	1	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	100 %	584.106.870	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	100 %	584.106.870	
5	2	1	2,06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.468.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.468.800	
5	2	1	2,06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	240.491.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	240.491.200	

No.						Rancangan Perubahan RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2	1	2,06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	136.261.900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	136.261.900	
5	2	1	2,06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.896.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.896.000	
5	2	1	2,06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	43.330.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	43.330.000	
5	2	1	2,06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	118.658.970	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	118.658.970	
5	2	1	2,06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	25.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	25.000.000	
5	2	1	2,07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100 %	1.586.292.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100 %	1.886.292.100	
5	2	1	2,07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	23 Unit	1.183.659.400	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut Tarogong Kidul, Sukagalih,	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	23 Unit	1.483.659.400	
5	2	1	2,07	05		Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	43.462.000	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	43.462.000	
5	2	1	2,07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut,	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	161.403.100	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut,	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	161.403.100	

No.						Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2	1	2,07	09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	
5	2	1	2,07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	
5	2	1	2,07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	197.767.600	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	197.767.600	
5	2	1	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	324.205.834	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	324.205.834	
5	2	1	2,08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	
5	2	1	2,08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.143.414	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.143.414	
5	2	1	2,08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Dokumen	59.510.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Dokumen	59.510.000	

No.						Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2	1	2,08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	134.552.420	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	134.552.420	
5	2	1	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Realisasi Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	814.960.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Realisasi Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	814.960.000	
5	2	1	2,09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	83 unit	464.960.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	83 unit	464.960.000	
5	2	1	2,09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	308.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	308.000.000	
5	2	1	2,09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	42.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	42.000.000	
5	2	4				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM	100 %	4.771.415.050	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM	100 %	4.771.415.050	
								Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100%				Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100%		
5	2	4	2,01			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase ketersediaan laporan penyediaan sarana dan Prasarana serta administrasi pajak daerah	100 %	4.771.415.050	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase ketersediaan laporan penyediaan sarana dan Prasarana serta administrasi pajak daerah	100 %	4.771.415.050	

No.						Rancangan Perubahan RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2	4	2,01	01		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	0	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	0	
5	2	4	2,01	02		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen	88.272.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen	88.272.000	
5	2	4	2,01	03		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	99.937.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	99.937.000	
5	2	4	2,01	04		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Unit	1.617.398.400	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Unit	1.617.398.400	
5	2	4	2,01	05		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	231.475.200	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	231.475.200	
5	2	4	2,01	06		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	462.383.221	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	462.383.221	

No.						Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2	4	2,01	07		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1000 Obyek Pajak	239.162.900	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1000 Obyek Pajak	239.162.900	
5	2	4	2,01	08		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen	491.023.057	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen	491.023.057	
5	2	4	2,01	09		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	2 Layanan	42.474.800	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	2 Layanan	42.474.800	
5	2	4	2,01	10		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	16 Laporan	140.142.100	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	16 Laporan	140.142.100	
5	2	4	2,01	11		Penagihan Pajak Daerah	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	882.052.472	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	882.052.472	
5	2	4	2,01	12		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Dokumen	228.549.800	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Dokumen	228.549.800	

No.						Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2	4	2,01	13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	189.257.800	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	189.257.800	
5	2	4	2,01	14		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	59.286.300	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	59.286.300	
TOTAL										22,447,455,570	TOTAL					

**Tabel 2. 11**  
**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Semula	Menja di	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasion al					Daerah	
5	02					KEUANGAN							39.681.087.875	21.103.077.849	22.447.455.570								36.216.830.597	BAPENDA
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	27.926.411.875	16.128.477.849	17.676.040.520	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	100 %	23.380.927.122	BAPENDA	
5	02	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	%		%	100 %	100 %	91.620.000	68.850.000	68.850.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	100 %	100.782.000	BAPENDA	
5	02	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokume n	38.850.000	38.850.000	38.850.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	6 Dokumen	42.735.000	BAPENDA	
5	02	01	2,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokume n	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	1 Dokumen	5.500.000	BAPENDA	
5	02	01	2,01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokume n	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	1 Dokumen	5.500.000	BAPENDA	
5	02	01	2,01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Dokumen	1 Dokume n	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana		7. Peningkatan pelayanan publik dan	ASN Bapenda	1 Dokumen	5.500.000	BAPENDA	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menja di	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasion al					Daerah
						Penyusunan Dokumen DPA- SKPD									Bagi Hasil		kinerja aparatur					
5	02	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokume n	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	1 Dokumen	5.500.000	BAPENDA
5	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	27.770.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	12 Laporan	30.547.000	BAPENDA
5	02	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	1 Laporan	5.500.000	BAPENDA
5	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Laporan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	%		%	100 %	100 %	17.375.675.875	12.100.334.678	13.875.331.979						100 %	18.983.581.376	BAPENDA
5	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bul an	70 Orang/b ul an	17.279.875.875	12.071.748.578	13.846.745.879	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	70 Orang/bulan	18.878.174.162	BAPENDA
																Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						BAPENDA
5	02	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	95.800.000	28.586.100	28.586.100	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana		7. Peningkatan pelayanan publik dan	ASN Bapenda	18 Laporan	105.407.214	BAPENDA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumbe r Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menja di	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasion al	Daerah			
						dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								Bagi Hasil		kinerja aparatur						
5	02	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tersedia	%		%	100 %	100 %	209.000.000	193.091.337	193.091.337					100 %	229.900.000	BAPENDA	
5	02	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokume n	209.000.000	193.091.337	193.091.337	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	12 Dokumen	229.900.000	BAPENDA	
5	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	%		%	100 %	100 %	334.060.000	229.202.400	229.202.400					100 %	367.361.160	BAPENDA	
5	02	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit	3 Unit	39.360.000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	3 Unit	43.294.405	BAPENDA	
5	02	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	196.900.000	185.302.400	185.302.400	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	1 Paket	216.590.000	BAPENDA	
5	02	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	53.900.000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	3 Orang	59.290.000	BAPENDA	
5	02	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi				50 orang	50 orang	43.900.000	43.900.000	43.900.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana	7. Peningkatan pelayanan publik dan	ASN Bapenda	50 orang	48.186.755	BAPENDA	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menja di	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasion al					Daerah
						Peraturan Perundang- Undangan								Bagi Hasil		kinerja aparatur						
5	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	%		%	100 %	100 %	1.164.184.000	711.541.500	584.106.870					100 %	1.283.224.338	BAPENDA	
5	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.515.000	10.468.800	10.468.800	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	1 Paket	36.866.038	BAPENDA
5	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	448.472.000	240.491.200	240.491.200	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	3 Paket	495.941.000	BAPENDA
5	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	136.267.000	136.261.900	136.261.900	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	2 Paket	149.894.000	BAPENDA
5	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokume n	13.310.000	9.896.000	9.896.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	12 Dokumen	14.641.000	BAPENDA
5	02	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	218.217.000	43.330.000	43.330.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	4 Laporan	240.039.000	BAPENDA
5	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	289.403.000	246.093.600	118.658.970	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	12 Laporan	318.343.300	BAPENDA
5	02	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokume n	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Bagi			ASN Bapenda	2 Dokumen	27.500.000	BAPENDA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								Nasional
														Hasil								
5	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	%		%	100 %	100 %	7.549.212.000	1.586.292.100	1.586.292.100						100 %	1.064.262.590	BAPENDA
5	02	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				23 Unit	23 Unit	832.750.000	1.183.659.400	1.183.659.400	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	23 Unit	466.025.000	BAPENDA
5	02	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.462.000	43.462.000	43.462.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	1 Paket	74.742.590	BAPENDA
5	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	300.000.000	161.403.100	161.403.100	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	2 Unit	155.000.000	BAPENDA
5	02	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	6.000.000.000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	1 Unit	0	BAPENDA
5	02	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	121.000.000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	1 Unit	168.845.000	BAPENDA
5	02	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	252.000.000	197.767.600	197.767.600	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	2 Unit	199.650.000	BAPENDA
5	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan	%		%	100 %	100 %	337.700.000	324.205.834	324.205.834						100 %	371.719.686	BAPENDA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menja di	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasion al					Daerah
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia																
5	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	12 Laporan	10.000.000	BAPENDA
5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	132.000.000	120.143.414	120.143.414	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	12 Laporan	145.371.953	BAPENDA
5	02	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	108.900.000	59.510.000	59.510.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	4 Laporan	119.789.733	BAPENDA
5	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	300.000.000	161.403.100	161.403.100	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	2 Unit	155.000.000	BAPENDA
5	02	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	6.000.000.000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	1 Unit	0	BAPENDA
5	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	86.800.000	134.552.420	134.552.420	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	12 Laporan	96.558.000	BAPENDA
5	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	%		%	100 %	100 %	864.960.000	914.960.000	814.960.000						100 %	980.095.972	BAPENDA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
						Pemerintahan Daerah yang tersedia																
5	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				83 Unit	83 Unit	564.960.000	564.960.000	464.960.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	83 Unit	650.960.000	BAPENDA
5	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	150.000.000	300.000.000	308.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	5 Unit	165.000.000	BAPENDA
5	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	150.000.000	50.000.000	42.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	5 Unit	164.135.972	BAPENDA
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM	%		%	100 %	100 %	11.754.676.000	4.974.600.000	4.771.415.050						100 %	12.835.903.475	BAPENDA
						Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	%		%	100 %	100 %									100 %		BAPENDA
5	02	04	2,01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase ketersediaan laporan penyediaan sarana dan Prasarana serta administrasi pajak daerah	%		%	100 %	100 %	11.754.676.000	4.974.600.000	4.771.415.050						100 %	12.835.903.475	BAPENDA
5	02	04	2,01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	60.060.000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	1). Wajib Pajak Daerah 2). 10 SKPD Pemungut Retribusi	1 Dokumen	72.672.000	BAPENDA
5	02	04	2,01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak				6 Dokumen	6 Dokumen	285.177.000	88.272.000	88.272.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	1). Wajib Pajak Daerah 2). 10 SKPD Pemungut Retribusi	6 Dokumen	313.694.700	BAPENDA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menja di	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasion al					Daerah
						Daerah																
5	02	04	2,01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	297.000.000	77.219.400	99.937.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	1). Wajib Pajak Daerah 2). 10 SKPD Pemungut Retribusi	2 Laporan	326.700.000	BAPENDA
5	02	04	2,01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				10 Unit	10 Unit	1.126.908.000	1.617.398.400	1.617.398.400	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	1). Wajib Pajak Daerah 2). 10 SKPD Pemungut Retribusi	10 Unit	1.309.908.000	BAPENDA
5	02	04	2,01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	362.854.000	291.475.200	231.475.200	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	1). Wajib Pajak Daerah 2). 10 SKPD Pemungut Retribusi	4 Laporan	379.139.000	BAPENDA
5	02	04	2,01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.759.182.000	518.273.221	462.383.221	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	1). Wajib Pajak Daerah 2). 10 SKPD Pemungut Retribusi	4 Laporan	1.760.101.000	BAPENDA
5	02	04	2,01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				1000 Obyek Pajak	1000 Obyek Pajak	662.750.000	239.162.900	239.162.900	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	1). Wajib Pajak Daerah 2). 10 SKPD Pemungut Retribusi	1000 Obyek Pajak	602.500.000	BAPENDA
5	02	04	2,01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokume n	608.273.000	491.023.057	491.023.057	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	1). Wajib Pajak Daerah 2). 10 SKPD Pemungut Retribusi	4 Dokumen	669.101.000	BAPENDA
5	02	04	2,01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2 Layanan	2 Layanan	50.600.000	42.474.800	42.474.800	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	1). Wajib Pajak Daerah 2). 10 SKPD Pemungut Retribusi	2 Layanan	121.000.000	BAPENDA
5	02	04	2,01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan				16 Laporan	16 Laporan	406.725.000	166.911.700	140.142.100	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana		8. Peningkatan investasi dan pendapatan	1). Wajib Pajak Daerah 2). 10 SKPD	16 Laporan	447.397.000	BAPENDA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menja di	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasion al					Daerah
						Penelitian dan Verifikasi								Alokasi Umum		daerah	Pemungut Retribusi					
5	02	04	2,01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	5.059.455.000	941.336.472	882.052.472	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	1). Wajib Pajak Daerah 2). 10 SKPD Pemungut Retribusi	12 Dokumen	5.565.400.775	BAPENDA
5	02	04	2,01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	399.000.000	237.508.550	228.549.800	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	1). Wajib Pajak Daerah 2). 10 SKPD Pemungut Retribusi	4 Dokumen	523.930.000	BAPENDA
5	02	04	2,01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	605.038.000	197.988.000	189.257.800	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	1). Wajib Pajak Daerah 2). 10 SKPD Pemungut Retribusi	12 Dokumen	665.541.000	BAPENDA
5	02	04	2,01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Laporan	4 Laporan	71.654.000	65.556.300	59.286.300	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	1). Wajib Pajak Daerah 2). 10 SKPD Pemungut Retribusi	4 Laporan	78.819.000	BAPENDA
TOTAL												39.681.087.875	21.103.077.849	22.447.455.570							36.216.830.597	

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efesien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
  - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
  - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
  - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;

- e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
- 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
  - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- 3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
  - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
  - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
  - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
  - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
- 4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
  - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
- 5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
  - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
  - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari

pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Kecamatan/SKPD adalah PPD 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur dan PPD 8 Peningkatan investasi dan pendapatan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut melaksanakan fungsi pengelola pajak daerah dan koordinator retribusi daerah. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Bapenda Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 174 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024 yaitu:

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan indikator Nilai Indek Kepuasan masyarakat.
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, dengan indikator Nilai hasil evaluasi SAKIP.
- 3. Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan indikator Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Kecamatan/Dinas/Badan ..... dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Bapenda Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	81,25
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai hasil evaluasi SAKIP.	71,75
	Meningkatnya proporsi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase pajak daerah dan retribusi daerah	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	6,00

	terhadap pendapatan adli daerah	terhadap pendapatan asli daerah			
--	---------------------------------	---------------------------------	--	--	--

Sumber : Perubahan Renstra Bapenda 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2

**Tabel 3.2**  
**Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA**  
**Tahun 2023**

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Badan Pendapatan Daerah	2	9	43	22.447.455.570
Total					22.447.455.570

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan pada 2 (dua) Program, 3 (kegiatan) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan setelah perubahan rencana kerja tahun 2023 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sebesar Rp. 22.447.455.570,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut dengan rincian sebagai berikut:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**

- Capaian Program : Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Pendapatan Daerah
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 17.676.040.520,00
- Keluaran : 1. Persentase pemenuhan dokumen perencanaan SKPD.
2. Persentase pemenuhan dokumen keuangan SKPD.
3. Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
4. Persentase Pemenuhan sarana prasarana Disiplin ASN dan kesesuaian kompetensi di Badan Pendapatan Daerah.
5. Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
6. Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di Badan Pendapatan Daerah.
8. Persentase Pemeliharaan Barang Milik

Daerah di Badan Pendapatan Daerah.  
Hasil : Nilai SAKIP Bapenda, Target: 71,50

**2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Capaian Program : Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 4.771.415.050,00

- Keluaran : 1. Persentase Pelayanan Pengaduan, keberatan dan konsultasi pajak daerah yang dilayani dan ditindaklanjuti.
2. Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerja Sama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
3. Persentase peningkatan pengelolaan sarana administrasi pajak daerah
4. Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasi Sistem pajak
5. Persentase pengelolaan teknologi informasi pajak daerah
6. Persentase pemenuhan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
7. Persentase tingkat kesadaran, kepatutan dan kepatuhan wajib pajak daerah dan Retribusi Daerah

Hasil : Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Target: 6,50%

Tabel 3. 3

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah  
Sub Unit Organisasi: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	02				KEUANGAN															21.103.077.849	22.447.455.570			36,216,830,597
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															16.128.477.849	17.676.040.520			23,380,927,122
5	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															68.850.000	68.850.000			100.782.000
5	02	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	38.850.000	38.850.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	42.735.000		
5	02	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Realisasi Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	5.500.000		
5	02	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna	Persentase Realisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	5.500.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							n Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Daerah yang tersedia														
5	02	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA- SKPD	Persentase Realisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	5.500.000
5	02	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Persentase Realisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokume n	100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	5.500.000
5	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna	Persentase Realisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	30.547.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
5	02	01	2,0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	36,216,830,597
5	02	01	2,0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Persentase Realisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokume n	100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	5.500.000
5	02	01	2,0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Persentase Realisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	30.547.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersedia															
5	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										12.100.334.678	13.875.331.979	23,380,927,122					
5	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Laporan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	70 Orang/b ulan	70 Orang/b ulan	100 %	100 %	12.071.748.578	13.846.745.879	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	18.878.174.162
5	02	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Realisasi Laporan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	18 Laporan	18 Laporan	100 %	100 %	28.586.100	28.586.100	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	105.407.214
5	02	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										193.091.337	193.091.337	229.900.000					
5	02	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Realisasi Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	12 Dokume n	12 Dokume n	100 %	100 %	193.091.337	193.091.337	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	229.900.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
								tersedia														
5	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										229.202.400	229.202.400			367.361.160			
5	02	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	43.294.405
5	02	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	185.302.400	185.302.400	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	216.590.000
5	02	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	3 Orang	3 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	59.290.000
5	02	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	50 orang	50 orang	100 %	100 %	43.900.000	43.900.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	48.186.755
5	02	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	43.294.405

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas Atribut Kelengkapan	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	185.302.400	185.302.400	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	216.590.000
5	02	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	3 Orang	3 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	59.290.000
5	02	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	50 orang	50 orang	100 %	100 %	43.900.000	43.900.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	48.186.755
5	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										711.541.500	584.106.870			1.283.224.338			
5	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	10.468.800	10.468.800	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	36.866.038
5	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	240.491.200	240.491.200	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	495.941.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Disediakan	Daerah yang tersedia														
5	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	136.261.900	136.261.900	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	149.894.000
5	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	9.896.000	9.896.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	14.641.000
5	02	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	43.330.000	43.330.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	240.039.000
5	02	01	2,06	09	Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyelenggan raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	246.093.600	118.658.970	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	318.343.300

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokume n	100 %	100 %	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	27.500.000
5	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										1.586.292.100	1.586.292.100					1.064.262.590	
5	02	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	23 Unit	23 Unit	100 %	100 %	1.183.659.400	1.183.659.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	466.025.000
5	02	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	43.462.000	43.462.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	74.742.590
5	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	161.403.100	161.403.100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	155.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	0
5	02	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	168.845.000
5	02	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	197.767.600	197.767.600	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	199.650.000
5	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										324.205.834	324.205.834			371.719.686			
5	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	10.000.000
5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	120.143.414	120.143.414	Dana Transfer Umum- Dana Bagi		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	145.371.953

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Air dan Listrik	daerah kabupaten/kota	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia									Hasil					
5	02	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	59.510.000	59.510.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	119.789.733
5	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	134.552.420	134.552.420	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	96.558.000
5	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										914.960.000		814.960.000	980.095.972				
5	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Realisasi Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	83 Unit	83 Unit	100 %	100 %	564.960.000	464.960.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	650.960.000
5	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/R eha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir eha bilitasi	Persentase Realisasi Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	300.000.000	308.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	165.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
								Pemerintahan Daerah yang tersedia														
5	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/R eha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Persentase Realisasi Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	50.000.000	42.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	100 %	164.135.972
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										4.974.600.000	4.771.415.050	36,216,830,597					
5	02	04	2,01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										4.974.600.000	4.771.415.050	23,380,927,122					
5	02	04	2,01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	72.672.000
5	02	04	2,01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembang an Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	100 % 100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	88.272.000	88.272.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	313.694.700

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	02	04	2,01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluas an Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	100 % 100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	77.219.400	99.937.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	326.700.000	
5	02	04	2,01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	100 % 100 %	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	1.617.398.400	1.617.398.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	1.309.908.000	
5	02	04	2,01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	291.475.200	231.475.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	379.139.000	
5	02	04	2,01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	518.273.221	462.383.221	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	1.760.101.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	04	2,01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	100 % 100 %	1000 Obyek Pajak	1000 Obyek Pajak	100 %	100 %	239.162.900	239.162.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	602.500.000
5	02	04	2,01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	491.023.057	491.023.057	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	669.101.000
5	02	04	2,01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	100 % 100 %	2 Layanan	2 Layanan	100 %	100 %	42.474.800	42.474.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	121.000.000
5	02	04	2,01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	100 % 100 %	16 Laporan	16 Laporan	100 %	100 %	166.911.700	140.142.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	447.397.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	04	2,01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	100 % 100 %	12 Dokume n	12 Dokume n	100 %	100 %	941.336.472	882.052.472	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	5.565.400.775	
5	02	04	2,01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	237.508.550	228.549.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	523.930.000	
5	02	04	2,01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	100 % 100 %	12 Dokume n	12 Dokume n	100 %	100 %	197.988.000	189.257.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	665.541.000	
5	02	04	2,01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	65.556.300	59.286.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	78.819.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan		Tolok Ukur
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
TOTAL											21.103.077.849	22.447.455.570	36,216,830,597			

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja**

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah untuk mencapai keselarasan yang berlandaskan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 yang tentunya memperhatikan kemampuan keuangan daerah, target kinerja yang sudah ditetapkan dan untuk mengakomodir pendanaan DAK dan Bankeu Propinsi.

Dokumen Perencanaan ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan di Bappeda tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut serta peran aktif stakeholder dalam mencapai target kinerja serta tujuan dan sasaran perangkat daerah.

#### **4.2. Kaidah - kaidah Pelaksanaan**

Seiring dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sebagai berikut :

- a. Dalam menyusun Perubahan Renja SKPD Tahun Anggaran 2023 ini, acuan utama yang digunakan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD yang merupakan dokumen komprehensif lima tahunan, arah Kebijakan Umum-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Garut dan rencana program indikatif dinas yang telah dirembukkan dengan seluruh unsur pelaku pembangunan Pengelolaan Keuangan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

- b. Perubahan Renja SKPD Tahun Anggaran 2023 sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, yang menggambarkan program prioritas pembangunan daerah juga merupakan Acuan dalam penggunaan APBD serta sebagai acuan penyusunan RKA SKPD pada tahun rencana.

#### **4.3. Rencana Tindak Lanjut**

Dalam rangka Pencapaian sasaran Perangkat daerah dan program program yang direncanakan.

- a. Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas perencanaan dengan memperhatikan peran dan fungsi masing masing perangkat daerah agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berorientasi hasil atau manfaat.
- b. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN